

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia ialah suatu negara yang terdiri dari kumpulan pulau dengan unit pemerintahan yang terkecil yaitu desa. Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang langsung berkaitan dengan masyarakat adalah desa . Dalam sistem pemerintahannya desa merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah karena terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan pemerintahan agar menimbulkan suatu kesejahteraan untuk masyarakat.

Pemerintah telah mengesahkan peraturan yang mengatur khusus tentang pemerintahan desa yang menyatakan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya, secara tidak langsung pemerintah desa agar lebih mandiri dalam pengelolaan dan mengembangkan suatu desa. Pemerintah memiliki kewenangan dalam memberdayakan perekonomian masyarakat desa. Oleh karena itu di bentuk

kelembagaan ekonomi yang dapat membantu dalam menggerakkan perekonomian di masyarakat desa.

Desa memiliki peran penting dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga dalam perencanaan yang dilakukan pemerintah dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan negara. Pembangunan pedesaan yang dimaksud yaitu menempatkan desa menjadi sarana pembangunan agar tujuan untuk mengurangi kesenjangan dapat diwujudkan. Hal ini dikarenakan keberadaan desa masih dianggap tertinggal jika dibandingkan dengan perkotaan dari tingkat ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas pendukung lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kreativitas serta inovasi dari masyarakat desa dalam pengelolaan perekonomian desa yaitu disebabkan masih banyaknya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan desa tersebut.

Lembaga mikro di wilayah desa yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi desa salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes didirikan bermaksud untuk menampung segala kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk badan usaha yang dikelola secara profesional, mandiri, efektif serta efisien. Sebagai suatu badan usaha milik desa yang mementingkan masyarakat, BUMDes menjalankan usahanya dengan berupaya memberikan pelayanan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada profit oriented namun juga social benefit (Kushartono, 2016). Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa, seperti sumber daya alam dan ekonomi. Namun potensi yang dimiliki setiap desa berbeda-beda, sehingga potensi usaha

tidak harus fokus pada kekayaan sumber daya alam. Hasil yang diperoleh BUMDes nantinya dapat digunakan untuk pembangunan desa, pengembangan usaha, serta pemberdayaan masyarakat.

BUMDes merupakan lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan untuk membantu memenuhi kebutuhan pelaku usaha ekonomi desa berskala mikro (Sukriani et al., 2018). BUMDes wajib membuat laporan keuangan secara akuntabel dan transparan yang dilakukan setiap bulan. Selain itu, pihak BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan melalui musyawarah desa yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu tahun berjalan.

Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh kualitas SDM yang berkompeten di dalam pengelolaan keuangan. SDM harus memiliki pemahaman akuntansi yang cukup dalam pembuatan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik (Riastika, 2019). Namun hasil observasi awal yang dilakukan peneliti terdapat beberapa permasalahan mengenai laporan keuangan pada beberapa BUMDes yang ada di Kabupaten Jembrana dimana laporan keuangan tidak balance dan ada keterlambatan pada saat pengumpulan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan kompetensi SDM yang ada pada BUMDes belum memahami mengenai akuntansi. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa bagian BUMDes, I Kadek Sudiarta, S. Kom, mengatakan bahwa terjadi beberapa permasalahan pada laporan keuangan BUMDes Kabupaten Jembrana. Adapun permasalahan yang terjadi yakni beberapa BUMDes tidak

menyetorkan laporan keuangan, mengalami keterlambatan pengumpulan laporan keuangan dan terdapat laporan keuangan tidak balance (wawancara, 1 Februari 2021). Hal itu terjadi dikarenakan SDM masih belum memahami akuntansi dan tidak memiliki riwayat pendidikan yang formal di bidang akuntansi, selain itu kurang optimalnya dalam pengawasan internal.

Laporan keuangan BUMDes merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pengelola BUMDes selama satu periode. Laporan keuangan pengelola BUMDes diwajibkan mengikuti Standar Akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. (Setyawan & Fauzan, 2018). Tujuannya agar laporan keuangan lebih accountable dan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Adapun karakteristik dari laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam membuat laporan yaitu : 1. Dapat dipahami, yang berarti kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakai. 2. Relevan, yang berarti informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan. 3. Andal, yang berarti bebas dari laporan yang menyesatkan atau bebas dari kesalahan material melainkan harus dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang harus jujur atas data yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat disajikan. 4. Dapat dibandingkan, yang berarti laporan keuangan dapat dibandingkan antara periode untuk mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan. Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan SDM yang memahami bidang akuntansi.

Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan

dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan (KBBI, 2021). Pemahaman merupakan suatu proses panjang dan bersifat individual. Pemahaman seseorang antara satu dengan yang lain tidak mungkin sama secara keseluruhan. Sebab, dalam memahami sesuatu seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu dan kemampuannya (Nova, 2015). Dengan tingkat pemahaman yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dari orang-orang yang menjalankan tugas untuk menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian paling utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut diharuskan untuk mengerti dan memahami bagaimana pelaksanaan dan proses akuntansi itu dijalankan dengan berpegang pada pedoman yang berlaku (Roviyantie, 2011).

Aspek kedua yang perlu diamati sejauh mana dapat mempengaruhi dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung sistem informasi keuangan. Seiring berjalan diberlakukannya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa teknologi informasi yang berbasis sistem. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan dalam proses



penyusunan laporan keuangan (Sari et al., 2014). Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisir formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan (Puteri et al., 2019).

Sejalan dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan diperlukan juga pengawasan internal. Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan berdasarkan sistem informasi akuntansi tidak menjamin terdapatnya kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan metode pengawasan internal yang memadai dan dapat memberikan bantuan memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai tujuannya (Hamen & Praptoyo, 2018). Pengawasan internal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak internal yang ditunjuk oleh pihak desa dengan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintahan mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku (Junaid, 2015).

Pengawasan pada BUMDes dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Sesuai yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa pada struktur kepengurusan BUMDes terdapat Dewan Pengawas Internal yang dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme. Ketua dan anggota pengawas tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengurus BUMDes. Tata kerja pengurus maupun pengawas diatur dalam Peraturan Desa. Pengawas juga wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap

organisasi, administrasi dan usaha BUMDes secara berkala sekurang-kurangnya 3 bulan sekali atau Triwulanan.

Pemilihan Kabupaten Jembrana sebagai lokasi penelitian didasari dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Jembrana ini memiliki perkembangan yang pesat dalam pertumbuhan pada BUMDes, serta setiap desa yang ada di Kabupaten Jembrana telah memiliki BUMDes. Dari 41 Desa yang ada di Kabupaten Jembrana telah memiliki 41 unit BUMDes dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Jumlah BUMDes setiap Kabupaten di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.1  
Jumlah BUMDes setiap Kabupaten di Provinsi Bali.

No.	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes (unit)	Persentase
1.	Jembrana	41	41	100%
2.	Tabanan	133	95	71%
3.	Badung	46	44	96%
4.	Denpasar	27	25	93%
5.	Klungkung	53	39	74%
6.	Bangli	68	64	94%
7.	Karangasem	75	69	92%
8.	Buleleng	129	113	88%
9.	Gianyar	64	55	86%
	Total	636	545	86%

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, 2019)

Dari total sebanyak 636 desa yang ada, di antaranya 545 desa yang telah mempunyai BUMDes. Hanya Kabupaten Jembrana yang memiliki sebanyak 41 desa yang secara keseluruhan mempunyai BUMDes. Sementara untuk Kabupaten Tabanan yang terdapat 133 desa, hanya terdapat 95 BUMDes. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar hampir rampung, yang masing-masing hanya terdapat dua desa yang belum mempunyai BUMDes. Pada Kabupaten Badung terdapat 46 desa, 44 di antaranya sudah memiliki BUMDes, sedangkan pada Kota Denpasar memiliki 25

BUMDes dari 27 desa. Kemudian Kabupaten Klungkung yang terdiri dari 53 desa memiliki 39 BUMDes. Kabupaten Bangli terdiri dari 68 Desa memiliki 64 BUMDes, untuk Kabupaten Karangasem yang mempunyai 69 BUMDes dari 75 desa, lalu pada Kabupaten Buleleng dari 129 desa terdapat 113 BUMDes. Jika diukur dengan persentase, pertumbuhan BUMDes di Jembrana 100 persen, Tabanan 71 persen, Badung 96 persen, Gianyar 86 persen, Klungkung 74 persen, Bangli 94 persen, Karangasem 92 persen, Buleleng 88 persen dan Denpasar 93 persen.

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi Sebagian besar pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna apabila informasi yang disajikan dapat dipahami, handal, relevan, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kondisi dan kinerja BUMDes tersebut. Selain itu laporan keuangan dapat digunakan sebagai pengendali dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Dewi (2020) dengan judul pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan mendapatkan yaitu hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puteri (2019), meneliti mengenai pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang menyatakan bahwa hasil penelitian pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.



Pada penelitian yang dilakukan oleh Hamen (2018) dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan, mendapatkan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Diani (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, mendapatkan hasil penelitian bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian lain dilakukan oleh Ponamon (2014) dengan judul Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Manado hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengawasan internal, memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aswandi (2018) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Empiris pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang), hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, ditemukan perbedaan hasil disetiap variabel. Hal ini yang mendasari peneliti untuk melakukan kembali terkait variabel

pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Puteri, dkk (2019) adalah objek penelitian yang dijadikan tempat penelitian, yaitu Puteri, dkk (2019) melakukan penelitian yang memfokuskan pada kualitas laporan keuangan di BNI Cabang Situbondo sedangkan penelitian ini dilakukan di BUMDes se-Kabupaten Jembrana yang lebih mengaji pada kualitas laporan keuangan BUMDes. Selain itu perbedaan penelitian ini yaitu ingin memperluas penelitian sebelumnya dari Puteri, dkk (2019) tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Bni Cabang Situbondo) dengan menambahkan variabel bebas (X3) yaitu Pengawasan Internal sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan BUMDes. Alasan pemilihan variabel ini didasari pada permasalahan yang terjadi di BUMDes Kabupaten Jembrana, berdasarkan wawancara yang diutarakan oleh I Kadek Sudiarta, S. Kom, selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa bagian BUMDes, menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi pada BUMDes yaitu kurang optimanya kinerja dari pengawasan internal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana”**.

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Terdapat masalah seperti laporan keuangan yang tidak *balance* dan keterlambatan pengumpulan laporan keuangan dikarenakan masih banyak pengurus BUMDes di Kabupaten Jembrana yang belum memahami bidang akuntansi.
- 1.2.2 Belum adanya regulasi dari pemerintah mengenai sistem informasi yang berlaku sehingga tidak adanya persamaan sistem informasi akuntansi pada setiap BUMDes di Kabupaten Jembrana.
- 1.2.3 Kurang optimalnya kinerja dari Badan Pengawas pada BUMDes di Kabupaten Jembrana, sehingga masih sering terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan

### **1.3 PEMBATAAN MASALAH**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penelitian ini memfokuskan pada variabel Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana.

### **1.4 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah pemahaman akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana ?
- 1.4.2 Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana ?

1.4.3 Apakah pengawasan internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana ?

1.4.4 Apakah pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan pengawasan internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana ?

## **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Untuk menguji adanya pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana.

1.5.2 Untuk menguji adanya pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana.

1.5.3 Untuk menguji adanya pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana.

1.5.4 Untuk menguji adanya pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sitem informasi akuntansi, dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana.

## **1.6 MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut.

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi serta wawasan yang jelas mengenai akuntansi khususnya pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Bagi lokasi penelitian hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak BUMDes sebagai tambahan informasi mengenai kualitas laporan keuangan, pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan pengawasan internal yang dibutuhkan agar dapat meningkatkan kinerja pengurus BUMDes. Bagi Universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

